

## **IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR TAHUN 2015/2016 DI SMA N 11 YOGYAKARTA**

### **IMPLEMENTATION OF SMART INDONESIA PROGRAM THROUGH SMART CARD INDONESIA IN 2015/2016 AT SMA N 11 YOGYAKARTA CITY**

Oleh:

Agus Setyani Sugiyasari, 13110241061, Kebijakan Pendidikan, FIP UNY  
[13110241061@student.uny.ac.id](mailto:13110241061@student.uny.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan: 1) mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar tahun 2015/2016 di SMA N 11 Yogyakarta dan 2) mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi PIP melalui KIP di SMA N 11 Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi PIP melalui KIP: PIP dikomunikasikan pada *event* tertentu seperti workshop. Sumber daya peralatan sudah memadai seperti komputer dan *wifi*. Jumlah pengelola PIP ada 2 orang. Informasi mengenai pengusulan dan pencairan dana sudah jelas. Peran sekolah antara lain pengusulan, sosialisasi, dan pembuatan surat keterangan. 2) Faktor yang mendukung: komunikasi, dukungan, sumber daya peralatan, dan informasi. Faktor yang menghambat: komunikasi, sumber daya modal dan akurasi data.

Kata kunci: *implementasi, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar*

#### **Abstract**

*The aim of this research: 1) describe the implementation of Smart Indonesia Program (PIP) through Smart Indonesia Card (KIP) at 2015/2016 in SMA N 11 Yogyakarta, 2) describe factors that support and hinder the implementation of PIP through KIP in SMA N 11 Yogyakarta. This research used qualitative approach with descriptive method. The data collection technique was observation, interview, and documentation. The data analysis technique used Milles and Huberman model which is reduction, data presentation, and conclusion. Data validity test was by sources and technique. The result of the research showed that: 1) Implementation of PIP through KIP: PIP communicated at certain event such as workshop. Equipment resources are adequate such as computers and wifi. The number of PIP managers is two persons. Information on proposal and fund disbursement is also clear. Schools play a role in terms of proposal, socialization, and making a certificate. 2) Factors that support PIP: communication, support, equipment resources, and information. Factors that hinder PIP: communication, budget resources, and accuracy data.*

*Key words: implementation, Smart Indonesia Program and Smart Indonesia Card*

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya pendidikan adalah untuk semua, konsep pendidikan untuk semua berarti mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu mendapat layanan pendidikan. Hak memperoleh layanan pendidikan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu tiap warga negara Indonesia berhak atas pengajaran. Hak memperoleh pendidikan juga tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 ayat 1 yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam rangka pemerataan akses dan kesempatan pendidikan Pemerintah mengeluarkan program wajib belajar. Dalam UU Sisdiknas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program wajib belajar masih ditemui kendala yaitu ada peserta didik putus sekolah atau rentan putus sekolah. Faktor penyebab peserta didik yang putus sekolah atau rentan putus sekolah adalah peserta didik yang kondisi ekonomi keluarganya kurang mampu sehingga orangtua tidak mampu membiayai pendidikan; yang

terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; dan yang dengan keinginan sendiri tidak mau sekolah.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY tahun 2015, jumlah peserta didik yang putus sekolah jenjang SD di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 10 peserta didik, Kulonprogo sebanyak 33 peserta didik, Bantul sebanyak 12 peserta didik, Sleman sebanyak 28 peserta didik dan Kota Yogyakarta sebanyak 1 peserta didik. Jenjang SMP jumlah peserta didik yang putus sekolah di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 52 peserta didik, Kulonprogo sebanyak 152 peserta didik, Bantul sebanyak 37 peserta didik, Sleman sebanyak 23 dan Kota Yogyakarta sebanyak 14 peserta didik. Untuk jenjang SMA jumlah peserta didik yang putus sekolah di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 13 peserta didik, Kulonprogo sebanyak 15 peserta didik, Bantul sebanyak 16 peserta didik, Sleman sebanyak 11 dan Kota Yogyakarta sebanyak 7 peserta didik. Sedangkan untuk jenjang SMK, jumlah peserta didik di kabupaten Gunung Kidul sebanyak 53 peserta didik, Kulonprogo sebanyak 28 peserta didik, Bantul sebanyak 46, Sleman sebanyak 31 peserta didik dan kota Yogyakarta sebanyak 162 peserta didik. Untuk jenjang sekolah yang berada di bawah naungan non Dinas Pendidikan jumlah peserta didik yang putus sekolah

untuk jenjang SD-MI di Kabupaten Gunung Kidul terdapat 2 peserta didik, Kulonprogo terdapat 8 peserta didik, Bantul sebanyak 3 peserta didik, Sleman dan Kota Yogyakarta tidak ada. Untuk jenjang SMP-MTs di kabupaten gunung Kidul terdapat 6 peserta didik, Kulonprogo terdapat 3 peserta didik, Bantul 5 peserta didik, Sleman 5 peserta didik dan Kota Yogyakarta tidak ada. Untuk jenjang SMA-MA jumlah peserta didik yang putus sekolah di Kabupaten Gunung Kidul tidak ada, Kulonprogo sebanyak 1 peserta didik, Bantul sebanyak 2 peserta didik, Sleman sebanyak 6 peserta didik, dan Kota Yogyakarta sebanyak 6 peserta didik. Total keseluruhan jumlah peserta didik yang putus sekolah di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 136 peserta didik, Kulonprogo sebanyak 240 peserta didik, Bantul sebanyak 121 peserta didik, Sleman sebanyak 105 peserta didik dan Kota Yogyakarta sebanyak 190 peserta didik. (Diakses dari: <http://www.bps.go.id/> pada Rabu, 18 Januari 2017 pukul 12:09 WIB). Salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari

keluarga tidak mampu. Program Indonesia Pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun.

Pelaksanaan PIP di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengalami kendala antara lain pendistribusian KIP. KIP belum mampu didistribusikan secara serempak mengingat membutuhkan waktu dan juga kesesuaian data penerima. Idealnya KIP didistribusikan langsung kepada penerima oleh pihak ketiga, akan tetapi yang terjadi kartu tersebut diserahkan ke kelurahan masing-masing. Pihak Dinas Pendidikan Kota tidak mengetahui siapa saja yang memperoleh KIP dan berapa jumlah KIP yang belum terdistribusikan. Kedua, kesalahan penulisan identitas penerima KIP (nama, jenis kelamin dan tanggal lahir) dan satu peserta didik memperoleh dua kartu dengan tanggal lahir yang berbeda. Ketiga, mengenai keterlambatan pencairan dana. Direktorat menerbitkan SK bahwa dana PIP dapat dicairkan oleh

peserta didik, akan tetapi ketika peserta didik pergi ke bank ternyata dana belum tersedia. Keempat, PIP masih dipertanyakan sudah tepat sasaran atau belum. Masyarakat, pengelola PIP di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan sekolah tidak mengetahui peserta didik yang memperoleh beasiswa PIP sudah tepat sasaran atau belum dikarenakan peserta didik yang memperoleh KIP dipilih melalui sistem dan data dari Badan Pusat Statistik. Persoalan lain adalah sulitnya pengawasan penggunaan dana PIP. Pihak Dinas Pendidikan mengalami kesulitan dalam memonitoring dan mengevaluasi penggunaan dana PIP. Hal ini dikarenakan dana PIP disalurkan langsung ke rekening pribadi peserta didik sehingga Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sulit memantau penggunaannya. Salah satu SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang melaksanakan PIP melalui KIP adalah SMA N 11 Yogyakarta. Peserta didik yang memperoleh PIP melalui KIP pada tahap 1 dan 2 sebanyak 9 peserta didik, untuk tahap 4 dan 5 sebanyak 4 peserta didik. Jumlah peserta didik yang mendapatkan PIP tidaklah sama dengan jumlah yang diusulkan. Hal ini disebabkan jumlah dana yang terbatas tetapi jumlah penerima banyak sehingga belum tentu yang diusulkan memperoleh PIP. Beasiswa PIP dapat diperoleh melalui dua

jalur yaitu jalur sekolah dan partai (fraksi). Untuk jalur sekolah dianggap sudah tepat sasaran tetapi untuk jalur yang fraksi masih kurang tepat sasaran dikarenakan latar belakang orangtua peserta didik yang diusulkan adalah Pegawai Negeri Sipil, hal ini bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan PIP. Sekolah sulit mengontrol atau mengawasi penggunaan dana dikarenakan PIP bukan dikelola untuk sekolah. Dalam petunjuk teknis pelaksanaan PIP juga tidak disebutkan mengenai laporan penggunaan dana sehingga sekolah tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, maka peneliti bermaksud meneliti tentang implementasi PIP melalui KIP tahun 2015/2016 di SMA N 11 Yogyakarta dan faktor pendukung serta penghambat implementasi PIP. Penelitian ini penting dilaksanakan dikarenakan Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa yang mendukung pendidikan menengah universal atau pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pemangku kepentingan khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dan sekolah mampu membuat kebijakan yang tepat dalam mengontrol implementasi Program

Indonesia Pintar agar tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan studi implementasi kebijakan serta mendukung penelitian sebelumnya. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi PIP di daerah Kota Yogyakarta dan bagi sekolah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi pelaksanaan PIP, sehingga dapat dicarikan solusi untuk perbaikan pelaksanaan beasiswa selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar tahun 2015/2016 di SMA N 11 Kota Yogyakarta dilihat dari aspek komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumber daya yang digunakan.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 11 Yogyakarta yang beralamat di Jl. AM Sangaji No.50, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta pada tanggal 25 Maret-18 April 2017.

### **Subjek Penelitian**

Subjek yang diteliti adalah Pengelola Program Indonesia Pintar di SMA N 11 Yogyakarta yaitu Kepala SMA N 11 Yogyakarta dan Guru BK, Pengelola PIP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, dan peserta didik yang memperoleh Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar tahun 2015/2016.

### **Prosedur**

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan maka penelitian dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara dan arsip pelaksanaan PIP. Setelah data terkumpul peneliti mereduksi data kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel dan menarik kesimpulan. Untuk mengetahui validitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari subjek penelitian

sedangkan data sekunder berasal dari arsip atau dokumen yang ada. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Pedoman observasi digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi lingkungan sekolah, sosialisasi PIP, kegiatan pembinaan peserta didik penerima PIP. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data dari subjek penelitian dan dokumentasi untuk mengecek arsip atau dokumen terkait PIP. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program perluasan atau pengembangan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Yang membedakan antara PIP dan BSM terletak pada prosedur dan sasaran (sasaran PIP lebih luas daripada BSM). PIP melalui KIP bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Program tersebut melibatkan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah, satuan pendidikan formal/nonformal, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan Kabupaten/Kota, dan lembaga penyalur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan KIP berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

### **Implementasi PIP melalui KIP di SMA N 11 Yogyakarta**

Implementasi PIP melalui KIP di SMA N 11 Yogyakarta dapat dilihat dari empat aspek yaitu komunikasi kebijakan, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **a. Aspek Komunikasi Kebijakan**

Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Sebelum dikomunikasikan ke sekolah biasanya akan diadakan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan dinas provinsi. Selanjutnya PIP dikomunikasikan oleh Dinas kepada sekolah ketika ada *event-event* tertentu seperti rapat program sekolah atau *workshop*, pihak sekolah akan diundang oleh Dinas dan yang biasanya datang adalah kepala sekolah bukan guru BK. Sekolah akan menginformasikan kepada semua peserta didik di setiap kelas. Bagi

peserta didik yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS) wajib segera melapor ke sekolah untuk diusulkan sebagai calon penerima PIP.

#### **b. Aspek Sumber Daya 1) Sumber Daya Manusia.**

Di SMA N 11 Yogyakarta yang menjadi pengelola PIP adalah guru BK dibantu oleh admin sekolah dan bendahara. Jumlah guru BK di SMA N 11 Yogyakarta adalah 2 orang, bendahara sekolah 1 orang, dan admin sekolah 1 orang. Jumlah pengelola di sekolah sudah cukup.

#### **2) Sumber Daya Modal**

Untuk mendukung pelaksanaan program dibutuhkan anggaran. Dana untuk melaksanakan PIP melalui KIP sepenuhnya dari pemerintah pusat. Dana tersebut berasal dari APBN. Kegiatan sosialisasi dan gaji pengelola tidak ada anggaran khusus.

#### **3) Sumber Daya Peralatan**

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan SMA N 11 Yogyakarta memiliki fasilitas yang memadai seperti komputer dan adanya *hotspot area* sehingga sekolah tidak kesulitan untuk mengentri data ke sistem dapodik.

#### **4) Sumber Daya Informasi**

Ketika sosialisasi PIP sebenarnya materi yang disampaikan dari pemerintah pusat sudah lengkap tetapi persepsi antara orang yang satu dengan yang lain berbeda, tidak mungkin semua mempunyai persepsi yang sama. Informasi yang dimaksud terkait dengan PIP melalui KIP adalah mengenai prosedur pelaksanaan (pengusulan dan pencairan dana), sasaran, dan manfaat dana PIP. Sekolah memberikan informasi yang jelas mengenai syarat-syarat yang diusulkan.

#### **c. Aspek Disposisi**

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (Subarsono, 2005:91). Dalam pelaksanaan PIP melalui KIP terdapat personil pelaksana yang proaktif terhadap program tersebut dan ada juga yang apatis. Personil pelaksana yang apatis berpikiran program tersebut merupakan program pemerintah pusat kenapa harus repot-repot mengurus program tersebut. Sekolah sebagai lembaga institusi sosial dalam masyarakat berusaha mendukung program PIP. Hal tersebut dibuktikan adanya kesediaan dari guru BK untuk melaksanakan tugasnya dalam menginformasikan kepada peserta didik tentang beasiswa tersebut dan mempermudah peserta didik dalam proses

pencairan dana PIP. Respon orangtua dengan adanya beasiswa PIP melalui KIP sangat senang karena dana yang diterima dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan membayar bimbingan belajar peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh DR, FK, dan ES. Orangtua mereka sangat senang ketika tahu mereka memperoleh beasiswa tersebut karena dapat meringankan biaya sekolah.

#### **d. Aspek Struktur Birokrasi**

Dalam penelitian tentang implementasi PIP melalui PIP aspek birokrasi difokuskan pada peran sekolah dan dinas DIKPORA dalam melaksanakan PIP melalui KIP serta strategi yang dilakukan untuk melaksanakan PIP agar efektif dan efisien.

##### **1) Peran Sekolah**

Sekolah berperan dalam hal mensosialisasikan PIP kepada peserta didik. Sekolah mensosialisasikan PIP secara lisan di masing-masing kelas. Sosialisasi dilakukan oleh guru BK sebagai pengelola atau penanggungjawab beasiswa PIP. Sekolah juga berperan dalam hal pengusulan calon penerima PIP melalui KIP. Pengusulan dilakukan dengan mendata peserta didik yang mempunyai KIP, KPS, KKS atau sesuai

dengan kriteria penerima PIP ke dalam sistem dapodik sekolah. Dalam sistem dapodik tersebut berisi nama peserta didik, alamat, nomor KIP, dan nama orangtua peserta didik. Admin sekolah bertugas untuk mengentry data peserta didik dalam sistem dapodik sekolah. Ketika dana sudah cair sekolah wajib menginformasikan kepada peserta didik dan membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai syarat pengambilan dana di lembaga penyalur.

Strategi yang dilakukan SMA N 11 Yogyakarta dalam mengimplementasikan PIP adalah mempermudah pengumpulan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengusulan dan secepatnya menginformasikan nomor rekening kepada peserta didik. Sekolah berusaha mengusulkan peserta didik yang memang layak untuk diusulkan.

##### **2) Peran Dinas dalam Melaksanakan PIP**

Dinas DIKPORA dalam pelaksanaan PIP melalui KIP tidak banyak terlibat secara langsung. Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan PIP dikarenakan untuk tahun 2015 SMA masih dibawah naungan Dinas Kabupaten/Kota Yogyakarta. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Dinas terlibat dalam hal sosialisasi PIP, pelayanan

masyarakat terkait PIP, merekap data pengusulan PIP, dan publikasi mengenai penerima PIP dan pencairan dana. Strategi yang dilakukan oleh Dinas adalah Dinas menginformasikan kepada sekolah untuk proaktif ke desa atau kecamatan untuk mengecek KIP yang belum terambil.

### **Cara Sekolah Mengawasi Penggunaan Dana PIP**

Dana PIP digunakan untuk kegiatan pendidikan dan tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Pada dasarnya sekolah mengalami kesulitan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana PIP. Hal tersebut dikarenakan dana PIP disalurkan langsung ke rekening pribadi peserta didik dan sekolah tidak mempunyai kewenangan melarang penggunaan dana PIP. Sekolah mengarahkan penggunaan dana PIP. Untuk mengontrol penggunaan dana yang dilakukan oleh peserta didik sekolah meminta peserta didik untuk mengumpulkan nota pembelian, sehingga sekolah mengetahui arah penggunaan dana PIP. Dalam petunjuk pelaksanaan PIP tidak disebutkan secara spesifik langkah yang dilakukan sekolah dalam memantau atau mengawasi penggunaan dana PIP, sehingga sekolah merasa kesulitan dalam mengawasi kesesuaian

penggunaan dana PIP. Sekolah juga tidak dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana PIP karna beasiswa PIP tidak dikelola untuk sekolah.

### **Dampak PIP**

Besaran dana yang diberikan kepada peserta didik pendidikan menengah atas kelas X untuk satu semester sebesar Rp500.000,00; kelas XI dan XII untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00. Dengan adanya beasiswa tersebut sangat membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli tas, buku, sepatu dan perlengkapan sekolah lainnya.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

**a. Faktor Pendukung:** Faktor pendukung PIP adalah adanya dukungan dari orangtua yang melapor kalau mempunyai PIP. sumberdaya peralatan sangat membantu dalam pelaksanaan PIP. Sekolah memberikan dukungan dalam hal pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas, hal tersebut dibuktikan dengan adanya komputer dan *wifi* yang menunjang implementasi PIP. Faktor ketiga, yang menunjang PIP adalah komunikasi kebijakan yaitu adanya koordinasi antara pengelola di pusat, daerah (provinsi) dan sekolah dan adanya kerjasama antara guru BK, admin sekolah dan bendahara

sekolah sangat membantu dalam pelaksanaan PIP. Faktor keempat, informasi. Informasi yang dimaksud adalah mengenai penggunaan KIP bagi peserta didik. Peserta didik yang memperoleh KIP segera lapor ke sekolah karena mereka memperoleh informasi dari petunjuk penggunaan kartu.

**b. Faktor Penghambat:** Faktor penghambat pelaksanaan PIP antara lain komunikasi kebijakan, sumberdaya modal, dan sumberdaya informasi. Komunikasi kebijakan berkaitan dengan kerjasama antara lembaga penyalur dengan sekolah tentang pengambilan dana. Terkadang peserta didik sudah datang ke bank tetapi dana belum bisa dicairkan. Kelompok sasaran yang diundang ke sosialisasi adalah kepala sekolah bukan pengelola PIP secara langsung. Sumber daya modal berkaitan dengan kurangnya anggaran untuk sosialisasi PIP, sehingga yang diundang bukanlah pengelola PIP secara langsung dan besaran dana yang diterima peserta didik masih kurang. Informasi menjadi penghambat pelaksanaan PIP karena informasi yang disampaikan ke peserta didik agak terlambat misalnya seperti pengumpulan syarat-syarat pengusulan. Informasi mengenai periode pencairan dana juga tidak pasti, sehingga peserta didik tidak mengetahui kapan dana dapat diambil. Sekolah mengalami kesulitan

tentang validitas data, sekolah sudah mengusulkan tetapi peserta didik tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima PIP sementara peserta didik yang diusulkan lewat jalur fraksi (partai) ditetapkan sebagai penerima PIP. Untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang dihadapi beberapa alternatif yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau tantangan tersebut antara lain guru BK di SMA N 11 Yogyakarta mencari informasi sendiri terkait pedoman pelaksanaan PIP, terkait validitas data, sekolah berusaha mengusulkan peserta didik yang memang layak untuk memperoleh PIP salah satunya dengan data sewaktu mendaftar ke SMA, terkait dengan pencairan dana sekolah berusaha mencari informasi ke Dinas Pendidikan Kota. Pengusulan lewat jalur fraksi adalah melalui DPRD komisi X bidang pendidikan dengan menggunakan sistem kuota.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar di SMA N 11 Yogyakarta dari aspek komunikasi kebijakan, PIP dikomunikasikan pada *event-event* tertentu dengan mengundang kepala sekolah bukan pengelola PIP secara

langsung, sekolah mengkomunikasikan PIP secara lisan ke peserta didik. Sekolah memberitahu syarat-syarat yang harus dikumpulkan untuk pengusulan. Dari aspek sumberdaya peralatan, sumberdaya peralatan sudah cukup dan membantu dalam pelaksanaan PIP antara lain komputer dan wifi. Jumlah pengelola PIP di SMA N 11 Yogyakarta sudah cukup yaitu 2 orang guru BK dengan dibantu oleh admin dan bendahara. Dari segi modal Dinas Pendidikan DIKPORa terbatas dalam anggaran untuk melaksanakan sosialisasi PIP. Informasi yang diberikan mengenai pengusulan dan pencairan dana sudah jelas.

#### 2. a. Faktor pendukung

Faktor pendukung Pelaksanaan PIP adalah adanya dukungan dari orangtua berupa orangtua lapor ke sekolah kalau mempunyai KIP, adanya kerjasama antara guru BK dengan admin dan bendahara sekolah, adanya koordinasi antara pengelola di tingkat pusat, daerah dan sekolah, fasilitas yang disediakan sekolah sudah memadai, dan informasi yang jelas.

#### b. Faktor penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan PIP kurangnya komunikasi antara lembaga penyalur dengan sekolah terkait pengambilan dana, kurangnya anggaran untuk sosialisasi PIP, dan akurasi data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Budi Widodo. (2015). *Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Pandak*. Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi UNY.
- H.A.R. Tilaar&Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.M. Hasbullah. (2014). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Joko Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Milles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Solikhin Abdul Wahab. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sri Esnawati. (2014). *Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi UNY.